

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan publik menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (Leo agustino, 2012:6) adalah sebagai “Keputusan Tetap” yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi peraturan”.

##### 2.1.1 Kebijakan Publik (*publik policy*)

Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas pelayanan yang diberikan lebih terarah serta mempunyai aturan dan tujuan yang lebih jelas. Secara etimologi istilah kebijakan dikemukakan oleh Duhn (1988:10) bahwa kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu “*polis*” (negara-kota), kemudian masuk kedalam bahasa latin “*Politea*” (negara) dan bahasa Inggris “*Police*” (kebijakan) dan “*Politics*” (politik).

Pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Friedrick (1963:79) “ *a purposed course of action of a person, group, or government within a given enviroment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilized and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose*”. Pendapat ini mengandung makna bahwa kebijakan merupakan rangkaian usulan dari seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu lingkungan tertentu yang menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap implementasi usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Ermaya (1993:192) memaknai kebijakan dalam 4 aspek yaitu, kebijakan yang diterapkan secara subjektif yang dalam operatifnya merupakan suatu pergarisan ketentuan, yang bersifat pedoman, pegangan, bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud/cara/sarana, bagi setiap usaha dan kegiatan kelompok manusia yang berorganisasi, sehingga terjadi dinamika gerakan tindakan yang terpadu sehaluan dan seirama dalam mencapai tujuan tertentu.

Nurrochmat (2006:2) mengemukakan bahwa istilah kebijakan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris pada masa pertengahan yaitu "*policie*", yang berasal dari kata Prancis kuno yakni *police* dan *policie*. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan kebutuhan. Proses kebijakan mencakup identifikasi informasi dan kemungkinan menentukan pilihan atau alternative, penentuan dan penetapan program-program, tindakan nyata, pembelanjaan prioritas, dengan memilih diantara alternative-alternative tersebut berdasarkan kualitas dan keluasan dampak atau manfaat atau resiko yang mungkin dapat ditumbulkan.

Pengertian kebijakan publik menurut Santoso (1998:5) adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Termasuk petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan tersebut yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut akhirnya disebut juga dengan kebijakan pemerintah atau negara seperti yang didefinisikan oleh Suradinata (1993:19) “ kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan serta strategi pemecahan yang terbaik”. Kebijakan atau seiring juga disebut sebagai ketetapan pemerintah yang berkuasa atau memiliki kewenangan atau otoritas adalah merupakan intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana atau mereka yang diberikan tugas untuk melaksanakannya.

Dalam hubungan itu pendapat para ahli sangat beragam beberapa pendapatnya salah satunya dikemukakan oleh Nakamura dan Smallwood dalam Sulaiman (1998:31) bahwa proses kebijakan adalah “ merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan, beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi”.

Proses pelaksanaan kebijakan merupakan serangkaian langkah dan tindakan terkait dengan pelaksanaan ketetapan pemerintah atau aturan yang terdiri atas beberapa langkah. Sebuah kebijakan hendaknya dapat tersusun dengan baik sehingga mudah terarah. Kebijakan yang tersusun secara baik tentu memerlukan waktu untuk berkembang dan semestinya tetap memperhatikan hal-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal seperti yang diutarakan oleh Winardi (1990:120) yaitu memungkinkan penafsiran terbuka dan penilaian, bersifat konsisten dan tidak boleh ada 2 kebijakan yang saling bertentangan dalam suatu organisasi, harus sesuai dengan keadaan yang berkembang, harus membantu pencapaian sasaran dan harus dibantu dengan fakta-fakta yang obyektif dan harus sesuai dengan kondisi-kondisi eksternal.

Pada dasarnya rumusan kebijakan memang harus bersifat obyektif baik sebagai dasar analisisnya maupun kondisi kebutuhan masyarakat atau obyek yang akan terkena dampak dari kebijakan yang akan diambil serta dapat memudahkan penentuan kebijakan untuk mengadakan revisi atau perbaikan, jika ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan obyektif. Istilah kebijakan dan kebijaksanaanya banyak terdapat dalam tulisan tetapi keduanya sebenarnya mempunyai arti yang hampir sama karena ada para ahli yang menggunakan sebagai kebijakan dan yang lainnya mengajukan istilah kebijaksanaan. Kebijaksanaan berasal dari kata wisdom (tindakan yang disertai dengan kejujuran, keadilan, kebajikan) sedangkan kebijakan terjemahan dari kata policy. selanjutnya Edwards III dan Sharkansky (1978:2) juga mendefenisikan kebijaksanaan negara adalah sesuai yang diungkapkan termasuk tindakan yang dibuat dan dilakukan termasuk yang tidak dilakukan dalam kaitannya dengan program pemerintah.

Para ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokkan tahapan tersebut, namun demikian menurut Hamdi (1999:3) pada umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap yaitu pendefinisian masalah (*policy Formulation*), pendefinisian agenda (*agenda setting*), perumusan alternatif kebijakan (*policy formlation*), pemilihan alternatif kebijakan (*policy adoption*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), penilaian kebijakan (*policy evaluation*). Dari keenam tahap itu yang akan menjadi fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah pada tahap pelaksanaannya kebijakan (*policy implementation*).

### 2.1.2 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya yaitu memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator), memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator), memadukan berbagai aktifitas (negara sebagai koordinator), menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor), Bambang Sunggono (1994:12).

### 2.1.3 Sifat Kebijakan Publik

Menurut Budi Winarno sifat kebijakan bisa diperinci menjadi beberapa kategori yaitu:

- a) Tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah ditunjukkan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau sistem politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Keputusan kebijakan (*policy decisoins*) didefenisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.
- c) Pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik yang termasuk dalam kategori adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
- d) Hasil kebijakan (*policy output*) lebih merujuk kemanifestasi nyata dari kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
- e) Dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibat bagi masyarakat baik yang diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah, Budi Winarno (2002:19-20).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Poerwadarmima (1990:327). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *timplement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). *To give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasi sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Wahab 1997:67)

Abdul Wahab (1997:65) menyatakan bahwa proses implementasi adalah “ *those action by public or private individuals groups that are directed the achivement og objectives set forth in prior decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Lebih lanjut Meter dan Horn (Wahab 1997:79) mengemukakan dimensi implementasi kebijakan sebagai konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi yaitu perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak.

### 2.1.5 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III (Leo Agustino, 2012:149) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Faktor komunikasi. Menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan didalam masyarakat.

ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan yakni :

1. transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua)
3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas.

- b. Faktor sumber daya. Edward III dalam Agustino (2012:151) mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu :

1. Staf, kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.
2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu, informasi yang berhubungan dengan cara



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kebijakan dan mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3. Wewenang. Bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.
4. Fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tidak akan terlaksana.
- c. Disposisi atau kecenderungan atau tingkah laku. Hal-hal yang perlu dicermati pada faktor disposisi menurut Edward III adalah “
  1. Pengangkatan Birokrat. Disposisi atau tingkah laku para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi.
  2. Insentif. Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif.
- d. Struktur birokrasi. merupakan salah badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintahan dan juga organisasi-organisasi swasta.

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur organisasi, struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut Anderson masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan respek anggota masyarakat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan, sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi, adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Sunggono 1994:144).

### 2.1.6 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu,

- a. Isi kebijakan, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci sarana-sarana dan penerapan teoritis atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
- b. Informasi, implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dukungan, pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian potensi, gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara pelaku yang terlibat dalam implementasi.

Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Sunggono 1994:149-153).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif. Didalam literatur kebijakan publik penggunaan istilah implementasi selalu berkonotasi implementasi kebijakan atau implementasi program. Mayer dan Greenwood (1986:13) mendefenisikan kebijakan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisiensi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara kolektif. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan, keputusan tersebut menggariskan tentang cara mencapai tujuan dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan tersebut dilakukan secara kolektif atau bersama. Hamdi (1999:14) memberikan penjelasan mengenai makna implementasi tersebut yaitu “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Suatu program kebijaksanaan publik meliputi penyusunan acara tertentu dan tindakan yang harus dijalankan, mislanya dalam bentuk tata cara yang harus ditaati atau diikuti dalam implementasinya patokan yang harus diadakan pada keputusan pelaksanaan atau proyek yang konkret yang akan dan hendak dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu bahwa program tersebut telah menjadi bagian dari kebijaksanaan publik yang akan diimplementasikan. Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang terendah. Disamping itu setiap pelaksanaan kebijaksanaan masih memerlukan pembentukan kebijaksanaan dalam wujud peraturan perundang-undang lainnya. Dalam implementasi kebijakan publik biasanya akan terkait dengan aktor pelaksana dalam berbagai kedudukan dan peran. Para pelaksana kebijakan adalah para aktor yang satu dengan yang lainnya yang dibebankan dengan penggunaan sarana.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Organisasi pelaksana meliputi keseluruhan para aktor pelaksana dan pembagian tugas masing-masing. Implementasi kebijakan publik sangat penting untuk memberikan perhatian yang khusus kepada peran dari kelompok-kelompok kepentingan (interest group) yang bertindak sebagai wakil pelaksana atau sebagai objek kebijaksanaan. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu kebijakan publik maka para pelaksana kebijaksanaan sebenarnya dihadapkan pada dua masalah yaitu yang berkaitan dengan lingkungan dan administrasi program.

Sedangkan menurut Cheema dan Rondinelli faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan dalam lima bagian yaitu,

1. Kondisi lingkungan
2. Hubungan dalam organisasi
3. Kemampuan dalam pelaksanaan
4. Karakteristik lembaga pelaksana
5. Pengaruh pelaksanaan

Beberapa pengaruh diatas menunjukan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan faktor-faktor dari dalam organisasi pemerintah dan faktor dari luar masyarakat yang akan menanggung dampak kebijakan tersebut. Untuk dapat memahami faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor intern organisasi dapat meninjau model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn, Wahab (2001:71) yang lebih dikenal dengan *“the top down a pproach”* yang mengatakan bahwa untuk dapat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan implementasi kebijakan publik dengan sempurna diperlukan persyaratan yaitu.

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kaulitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Dengan demikian apabila suatu kebijakan publik memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dengan memerhatikan prosedur yang ada maka diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang efektif bahwa kebijakan yang efektif itu menurut Islamy (2000:107) adalah suatu kebijakan akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian kalau mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara itu maka kebijaksanaan negara menjadi tidak efektif.

### 2.1.7 Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan /atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

### 2.1.8 Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

## 2.2 Retribusi Kebersihan

Dalam membuat kebijakan daerah khususnya kebijakan dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Menurut Mahmudi (2010:25) mengatakan bahwa “Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah”.

Menurut Sugianto (2008:52) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Salah satu objek retribusi adalah retribusi kebersihan.

Retribusi kebersihan pungutan dan pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan merupakan unit kerja yang tugasnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberikan pendapatan untuk kota Pekanbaru melalui pungutan Retribusi kebersihan yang dilakukan terhadap wajib Retribusi yang ada di Kota Pekanbaru.

Adapaun Prosedur didalam Retribusi Persampahan/Kebersihan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 yaitu :

a. Tata Cara Pemungutan

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan & Pertamanan (DKP) kota Pekanbaru.
2. Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditagih langsung oleh petugas penagih yang ditunjuk oleh Dinas Kebersihan & Pertamanan kota Pekanbaru.
3. Besarnya Tarif retribusi pelayanan persampahan ini tertuang dalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 48 tahun 2016 dan diklasifikasikan dalam lampiran peraturan walikota ini.
4. Pengembalian atas kelebihan pembayaran dapat diajukan kepada Dinas Kebersihan & Pertamanan kota Pekanbaru paling lama 1(satu) bulan setengah transaksi pembayaran pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
5. Dalam hal pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diajukan melebihi 1 (satu) bulan, maka pengajuan tidak berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Kerjasama Pemungutan

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat dikerjasamakan dengan instansi/badan/lembaga sesuai peraturan perundangan berdasarkan target yang ditetapkan oleh Dinas Kebersihan & Pertamanan kota Pekanbaru.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

c. Penagihan

1. Penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran berupa karcis, SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan oleh Dinas Kebersihan & Pertamanan kota Pekanbaru.
2. Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Apabila penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi tanggal 10 maka dilakukan penagihan ulang kepada wajib Retribusi.
4. Hasil penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Bendahara penerimaan Dinas Kebersihan & Pertamanan kota Pekanbaru paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Retribusi Menurut Pandangan Islam

Retribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa" dengan kata lain bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi tidak termasuk dalam pengertian pajak karena pihak yang membayar tersebut menggunakan langsung fasilitas yang dikenakan retribusi tersebut.

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (*jaiz*) selama mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, misalnya firman Allah ta'ala untuk mentaati *ulil amri* (Pemerintah) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. QS An-Nisaa : 59.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam beberapa haditsnya Rasulullah juga memerintahkan agar senantiasa taat kepada pemerintah :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فقال العرياض : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع ، فما تعهد إليها ؟ فقال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا

Dari Abu Najih 'Irbadh bin Sariyah radhiallahu 'anhu dia berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, seperti ini adalah nasihat perpisahan, karena itu berilah kami nasihat”. Beliau bersabda, “Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla, tunduk taat (kepada pemimpin) meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habsyi. HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini hasan shahih”.

Dalam Hadis riwayat Ibnu Abbas ra., ia berkata: Ayat ini turun: Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul dan kepada ulil amri (pemimpin) di antara kamu berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi, yang diutus Nabi saw. dalam suatu pasukan perang. HR Muslim. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.: Dari Nabi saw. beliau bersabda: Barang siapa yang mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpin berarti ia telah mematuhi Allah dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah mendurhakaiku. HR Muslim

Merupakan kewajiban bagi warga Negara untuk mentaati pemerintah selama tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, walaupun hal tersebut tidak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disukainya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.: Dari Nabi saw. beliau bersabda: Kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat dalam melakukan perintah yang disukai atau pun tidak disukai, kecuali bila diperintahkan melakukan maksiat. Bila dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar serta taat. HR Muslim.

Kewajiban taat hanya pada sesuatu yang baik, adapaun dalam hal-hal yang bersifat kemaksiatan maka tidak ada ketaatan di sana. Walaupun demikian ketika pemerintah menetapkan satu peraturan yang tidak kita sukai maka bukan berarti kita menentangnya. Jika kita mampu maka nasehatilah pemerintah dengan cara yang baik. Sebagaimana Hadis riwayat Abdullah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya akan muncul sepeninggalku sifat egois (pemimpin yang mengutamakan kepentingan diri sendiri) dan beberapa perkara yang tidak kamu sukai. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepada seorang dari kami yang mengalami zaman itu? Beliau menjawab: Laksanakanlah kewajiban kamu dan mohonlah kepada Allah yang menjadi hakmu. HR Muslim.

Maka setiap warga Negara wajib untuk mentaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk dalam masalah retribusi. Beberapa kaidah fihiyyah juga membahas tentang hak dari pemerintah untuk memungut retribusi secara umum kepada warga negaranya karena adanya kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan maka dilarang, sebagaimana kaidah fihiyyah yang menegaskan “Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan syari’ah”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syari'ah adalah pencurian atau perampokan harta yang ada sanksinya, tetapi jika dibenarkan oleh syari'ah maka diperbolehkan. Misalnya : petugas zakat dibolehkan mengambil harta zakat dari muzaki yang sudah wajib mengeluarkan zakat.

## 2.4 Definisi Konsep

Defenisi konsep bertujuan sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian yang akan dikemukakan sebagai berikut :

### 1. Kebijakan publik

Kebijakan publik adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan”.

### 2. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik adalah bermula pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas , tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Retribusi Daerah

retribusi yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

### 4. Retribusi Kebersihan

Adalah pungutan biaya yang dikenakan kepada setiap masyarakat yang menghasilkan sampah, yang diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

## 2.5 Konsep Operasional Penelitian

Untuk melakukan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis dan pakar, akan tetapi lebih dikongkritkan dalam melakukan penelitian.

**Tabel 2.1 : Konsep Operasional Penelitian**

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Peraturan Walikota Pekanbaru No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	1. Tata Cara Pemungutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pemungutan retribusi persampahan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan &amp; Pertamanan Kota Pekanbaru.</li> <li>Tata cara pemungutan retribusi kebersihan ditagih langsung oleh petugas penagih yang ditunjuk oleh Dinas Kebersihan.</li> <li>Besarnya tarif retribusi kebersihan ini tertuang dalam lampiran peraturan walikota.</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>2. Kerjasama Pemungutan</p> <p>3. Penagihan</p> <p>4. Keberatan Tarif</p>		<p>d. Pengembalian atas kelebihan pembayaran dapat diajukan kepada dinas kebersihan paling lama 1 bulan setelah transaksi pembayaran pemungutan retribusi kebersihan.</p> <p>a. Pelaksanaan pemungutan Retribusi kebersihan dapat dikerjasamakan instansi/badan/lembagases uai peraturan perundangan berdasarkan target yang telah ditetapkan</p> <p>b. Kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama.</p> <p>a. Penagihan retribusi kebersihan dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran berupa karcis, SKRD atau dokumen lain diterbitkan oleh Dinas Kebersihan.</p> <p>b. Penagihan dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10.</p> <p>c. Apabila penagihan melebihi tanggal 10 maka dilakukan penagihan ulang kepada wajib retribusi.</p> <p>d. Hasil penagihan wajib disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Kebersihan paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya.</p> <p>a. Wajib retribusi dapat mengajukan secara tertulis keberatan terhadap penetapan tagihan dengan disertai bukti-bukti sah dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sejak</p>
--	--	---



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>tanggal penetapannya.</p> <p>b. Kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan setelah diterimanya pengajuan surat keberatan.</p> <p>c. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan tidak atau belum dikeluarkan keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.</p> <p>d. Kewajiban untuk membayar tagihan retribusi tidak tertunda dengan diajukan keberatan terhadap penetapan tagihan.</p> <p>a. Pengihan retribusi sampah kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya pelayanan retribusi sampah.</p> <p>b. Kadaluarsa penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tertangguh apabila diterbitkannya surat teguran/surat paksa dan terdapat pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>a. Piutang Retribusi kebersihan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.</p> <p>b. Keputusan penghapusan</p>
	5. Kadaluarsa	
	6. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa	

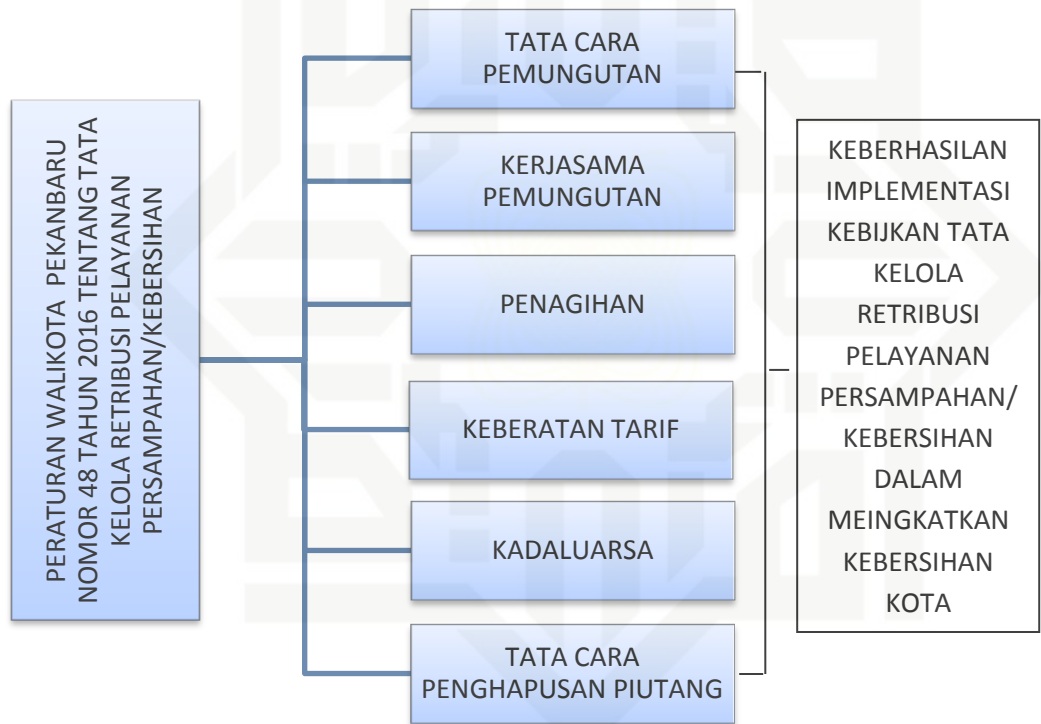
#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebersihan kota Pekanbaru.
--	--	---

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

1. Septyowati, Santi. 2009. “ Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kota Pasuruan (Study pada Pemerintah Kota Pasuruan)”.

Hasil penelitian : hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi sampah di kota Pasuruan menggunakan pedoman peraturan daerah No.2 tahun 2000 beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi kebijakan retribusi di kota Pasuruan adalah

- a. Kurangnya kesadaran wajib retribusi.
- b. Tingkat pelayanan pengelolaan persampahan yang belum maksimal.
- c. Belum efektifnya sanksi.
- d. Sering terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah.
- e. Masih kurangnya penerangan jalan dan kurang tertatanya taman-taman di kota Pasuruan.

2. Sudiyanto Tahun 2006 “ Implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2001 tentang Retribusi pelayanan sampah/kebersihan di Kota Surakarta”.

Hasil penelitian : menunjukkan bahwa peraturan daerah No.4 tahun 2001 tentang retribusi telah dilaksanakan, hanya saja hasilnya belum maksimal sehingga belum dapat menutup kebutuhan biaya operasional pengelolaan sampah.